

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Di Provinsi Bali terdapat lembaga keuangan mikro selain perbankan yang berperan besar dalam pembangunan ekonomi daerah. Lembaga keuangan mikro tersebut adalah Lembaga Perkreditan Desa atau yang biasa disingkat LPD, LPD terdapat di masing-masing desa adat/desa pekraman. LPD pertama kali didirikan pada tahun 1984 sebagai lembaga milik desa yang membantu masyarakat desa untuk memperoleh dana, baik yang digunakan sebagai modal usaha maupun kegiatan lainnya (Widhiastuti, Dkk, 2023).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan badan usaha simpan pinjam yang dimiliki oleh desa pakraman, dengan tujuan dari pendirian LPD adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan serta penyertaan modal, memberantas ijon dan gadai gelap, menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa serta meningkatkan daya beli dan melancarkan pembayaran dan peredaran uang di desa (Perda No. 8 Tahun 2002 dan Perda No. 3 Tahun 2007).

Peran LPD sangatlah penting dalam upaya meujudkan pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi mikro dalam wilayah pedesaan. Adanya LPD diharapkan memberikan dampak positif kepada masyarakat maupun pemerintah Desa, namun kenyataanya, pada saat ini sering terjadi permasalahan pada LPD, baik dari segi internal maupun eksternal yang sampai

menyebabkan kebangkrutan pada LPD. Menurut FaktaPers.id (2022) maraknya LPD bermasalah di wilayah Kabupaten Buleleng akibat dari pengelolaan yang kurang efisien sehingga tidak memberikan efek yang luar biasa bagi masyarakat di wilayah LPD itu sendiri.

LPD yang bermasalah yakni LPD yang ada di Kecamatan Tejakula. Hal ini bisa dilihat dari data perkembangan LPD tahun 2019 di Kecamatan Tejakula masih terdapat LPD yang di kategorikan kurang sehat, yakni LPD Desa Tembok (prokomsetda.bulelengkab.go.id, 2019). Data kondisi LPD di Kecamatan Tejakula dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1**  
**Data Perkembangan LPD di Kecamatan Tejakula**

No	Desa	Kondisi
1	Bondalem	Sehat
2	Tejakula	Sehat
3	Les Penuktukan	Sehat
4	Bangkah	Sehat
5	Ngis	Sehat
6	Sambirenteng	Cukup Sehat
7	Madenan	Sehat
8	Sembiran	Sehat
9	Pacung	Sehat
10	Gentuh	Sehat
11	Sangambu	Sehat
12	Julah	Cukup Sehat
13	Gretek	Sehat
14	Keduran	Sehat
15	Tembok	Kurang Sehat

(Sumber: prokomsetda.bulelengkab.go.id, 2019)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan masih ada LPD di Kecamatan Tejakula dalam kondisi yang kurang sehat, bahkan berdasarkan observasi langsung yang peneliti lakukan, ada beberapa LPD di Kecamatan Tejakula yang sudah tidak beroperasi, yakni LPD Desa Adat Gretek dan LPD Desa Adat Tembok. Kondisi kurang sehat dan berhentinya aktivitas LPD disebabkan karena tindakan internal

oleh pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan mereka, sehingga berpotensi merugikan LPD (Juliantari et al., 2020). Pada LPD Desa Adat Tembok kemungkinan sudah tidak beroperasi lagi karena disebabkan kelemahan sistem pengendalian manajemen, serta kurang adanya teladan atau panutan pemimpin (Kompasiana.com, 2022). Selain itu, berdasarakan LPLPD Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa LPD Kecamatan Tejakula mengalami fluktuasi penurunan ROA yang cukup tajam selama tahun 2019-2020, yakni sebesar 1,7% (dari 3,68% menjadi 1,98%) (Kadek Pitarini, 2022).

Kondisi LPD yang kurang sehat serta adanya penurunan ROA tersebut tentu akan menimbulkan hilangnya kepercayaan dari masyarakat selaku nasabah kepada lembaga LPD yang merasa bahwa kinerja LPD saat ini sangatlah rendah, maka sangat perlu diterapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* agar LPD bisa lebih dipercaya sebagai lembaga keuangan mikro berbasis adat yang terjamin kinerjanya. Penerapan akan prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan dalam menjalankan suatu usaha, karena GCG dapat membantu dalam mencegah terjadinya permasalahan dalam perusahaan, kecurangan serta kejahatan yang berhubungan dengan keuangan dari organisasi (Adnyani dan Julainto, 2021). Prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap organisasi meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran dan independensi (Adnyani dan Julainto, 2021).

Prinsip GCG yang pertama mempengaruhi kinerja adalah transparansi, transparansi berkaitan dengan menjaga objektivitas bisnisnya. LPD harus menyediakan informasi relevan dengan cara mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. LPD harus mengambil inisiatif untuk menjelaskan tidak

hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang – undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemangku kepentingan. Semakin transparan LPD dalam mengungkapkan keadaan dan informasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan danannya di LPD sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan LPD (Widhiastuti, Dkk, 2023).

Prinsip GCG yang kedua mempengaruhi kinerja adalah akuntabilitas, akuntabilitas merupakan sikap LPD dalam mempertanggungjawabkan kerjanya, untuk itu LPD harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan LPD dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan. Dengan pelaksanaan akuntabilitas akan menghasilkan pengelolaan keuangan yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Sehingga ketika akuntabilitas semakin tinggi dan baik dalam suatu entitas organisasi pemerintahan maka kepercayaan dan keandalan hasil kinerja keuangan daerah akan semakin baik (Widhiastuti, Dkk, 2023).

Prinsip GCG yang ketiga mempengaruhi kinerja adalah responsibility atau pertanggungjawaban, responsibility merupakan keharusan LPD untuk mentaati peraturan perundang – undangan. LPD harus mematuhi peraturan perundang – undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip responsibility yang berkaitan dengan pemahaman dan taat terhadap seluruh peraturan perundangan serta peraturan LPD yang berlaku maka kinerja Lembaga Perkreditan Desa akan semakin meningkat. Selain itu melaksanakan tanggung jawab kepada

*stakeholders* serta peduli terhadap masyarakat atau krama desa dan kelestarian lingkungan juga akan meningkatkan kinerja LPD (Widhiastuti, Dkk, 2023).

Prinsip GCG yang keempat mempengaruhi kinerja adalah kewajaran, kewajaran artinya LPD harus memperhatikan kepentingan pihak – pihak yang berkaitan dengan LPD. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan. Berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Memperhatikan kepentingan *stakeholder* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan kearah yang lebih baik (Widhiastuti, Dkk, 2023).

Prinsip GCG yang kelima mempengaruhi kinerja adalah independensi, independensi merupakan sikap LPD yang tidak memiliki keterkaitan dengan pihak manapun. Untuk melancarkan pelaksanaan *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi intervensi oleh pihak lain. Jika dalam mengelola LPD pengurus LPD mengambil keputusan yang objektif (bebas dari kepentingan berbagai pihak) dan dapat menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun maka sikap tersebut dapat meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (Widhiastuti, Dkk, 2023).

Menerapkan *good corporate governance* dapat mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri, sehingga dengan hal tersebut maka secara otomatis akan meningkatkan kinerja LPD kearah yang lebih baik. Perkembangan keuangan LPD yang cenderung meningkat tentu saja akan memberikan harapan bagi semua pihak terkait, baik pemilik maupun masyarakat disekitarnya. Maka dari itu penerapan *good corporate governance*

sangat berpengaruh untuk pengelola LPD sehingga mampu meningkatkan kinerjanya (Widhiastuti, Dkk, 2023). Konsep *good corporate governance* muncul berkaitan dengan *agency theory*, hal ini terjadi untuk menghindari konflik antara *principal* dan *agent*. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan, perbedaan kepentingan tersebut haruslah dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada para pihak. Teori agensi mendorong munculnya konsep *good corporate governance* dalam pengelola bisnis perusahaan, dimana *good corporate governance* diharapkan dapat meminimalisir *vested interest management* melalui pengawasan terhadap kinerja para agen. *Good corporate governance* memberikan jaminan kepada *principal* bahwa perusahaan dikelola dengan baik dan para *agent* bekerja sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan untuk kepentingan perusahaan.

Akan tetapi, penelitian-penelitian terdahulu menemukan hasil yang inkonsisten terkait pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja LPD, sehingga peneliti memasukkan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi pada penelitian ini, karena kinerja organisasi yang baik harus memiliki sistem pengendalian internal yang baik (Dwi Novrianti, Dkk (2022). Sistem pengendalian internal adalah suatu sistem atau proses yang dipengaruhi dalam memberikan jaminan yang meyakinkan mengenai tujuan organisasi dapat dicapai melalui efektivitas dan efisiensi operasi, penyajian laporan keuangan yang dipercaya, serta ketaatan terhadap perundang-undangan dan aturan yang berlaku (Adnyani dan Julianto, 2021). Pemilihan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi dikarenakan sistem pengendalian internal merupakan salah satu faktor intern yang cukup penting ada pada suatu perusahaan atau organisasi agar operasional perusahaan dapat berjalan secara efisien dan dapat mewujudkan tujuan

perusahaan. Sehingga, peneliti meyakini bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* serta ditambah dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik maka akan meningkatkan kinerja LPD.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini akan lebih mengkaji tentang kinerja LPD yang dinilai berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi, untuk lebih membuktikan pengaruh dari prinsip-prinsip *good corporate governance* seperti prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip pertanggungjawaban, prinsip kewajaran dan prinsip independensi terhadap kinerja dari LPD. Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Tejakula, dengan seluruh pegawai LPD yang ada di Kecamatan Tejakula sebagai responden, pemilihan Kecamatan Tejakula sebagai tempat penelitian dikarenakan di Kecamatan Tejakula terjadi kasus yang berkaitan dengan kinerja LPD sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Tejakula, selain itu beberapa penelitian terdahulu yang mengenai kinerja LPD belum ada yang dilakukan di Kecamatan Tejakula, sehingga peneliti merasa tertantang untuk melakukan penelitian di LPD Kecamatan Tejakula agar penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi kepustakaan untuk penelitian-penelitian selanjutnya serta dapat memberikan pengetahuan serta wawasan bagi pengurus LPD mengenai pentingnya melakukan penerapan *good corporate governance* agar menciptakan kinerja yang baik.

Jadi, berdasarkan uraian diatas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja LPD dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi”.

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

- 1) Adanya penurunan kinerja dari lembaga LPD yang harusnya dibangun sebagai badan usaha simpan pinjam yang dimiliki oleh desa pakraman, dengan tujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa.
- 2) Penurunan kinerja dari LPD diakibatkan karena adanya oknum-oknum pegawai LPD (*agent*) yang melakukan korupsi dan kecurangan lainnya sehingga menimbulkan hilangnya kepercayaan dari masyarakat (*principal*) kepada lembaga LPD.
- 3) Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran dan independensi belum dijalankan secara maksimal.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada pengaruh lima variabel independen yang digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, dan independensi. Serta satu variabel moderasi yaitu sistem pengendalian internal. Pembatasan waktu penelitian ini dimulai dari bulan november 2023 sampai dengan bulan Februari 2024, dengan metode kuesioner yang akan disebarakan ke LPD yang ada di Kecamatan Tejakula, Buleleng.



#### 1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah transparansi berpengaruh pada kinerja LPD di Kecamatan Tejakula?
- 2) Apakah akuntabilitas berpengaruh pada kinerja LPD di Kecamatan Tejakula?
- 3) Apakah pertanggungjawaban berpengaruh pada kinerja LPD di Kecamatan Tejakula?
- 4) Apakah kewajaran berpengaruh pada kinerja LPD di Kecamatan Tejakula?
- 5) Apakah independensi berpengaruh pada kinerja LPD di Kecamatan Tejakula?
- 6) Apakah sistem pengendalian internal memperkuat pengaruh transparansi terhadap kinerja LPD di Kecamatan Tejakula?
- 7) Apakah sistem pengendalian internal memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja LPD di Kecamatan Tejakula?
- 8) Apakah sistem pengendalian internal memperkuat pengaruh pertanggungjawaban terhadap kinerja LPD di Kecamatan Tejakula?
- 9) Apakah sistem pengendalian internal memperkuat pengaruh kewajaran terhadap kinerja LPD di Kecamatan Tejakula?
- 10) Apakah sistem pengendalian internal memperkuat pengaruh independensi terhadap kinerja LPD di Kecamatan Tejakula?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap kinerja LPD di Kecamatan Tejakula.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja LPD di Kecamatan Tejakula.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh pertanggungjawaban terhadap kinerja LPD di Kecamatan Tejakula.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh kewajaran terhadap kinerja LPD di Kecamatan Tejakula.
- 5) Untuk menganalisis pengaruh independensi terhadap kinerja LPD di Kecamatan Tejakula.
- 6) Untuk menganalisis apakah sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh transparansi terhadap kinerja LPD di Kecamatan Tejakula.
- 7) Untuk menganalisis apakah sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja LPD di Kecamatan Tejakula.
- 8) Untuk menganalisis apakah sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh pertanggungjawaban terhadap kinerja LPD di Kecamatan Tejakula.
- 9) Untuk menganalisis apakah sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh kewajaran terhadap kinerja LPD di Kecamatan Tejakula.
- 10) Untuk menganalisis apakah sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh independensi terhadap kinerja LPD di Kecamatan Tejakula.

## **1.6 Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yakni dapat memberikan tambahan bukti empiris mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran dan independensi terhadap kinerja LPD.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi LPD

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan bagi pegawai LPD mengenai pentingnya melakukan penerapan *good corporate governance* dan meningkatkan sistem pengendalian internal agar menciptakan kinerja yang baik, sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat selaku nasabah.

### b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan bagi masyarakat selaku nasabah agar lebih cermat dan teliti dalam memilih lembaga keuangan untuk menyimpan dana. Masyarakat juga harus mengetahui tentang *good corporate governance* sebagai salah satu indikator dalam menentukan kinerja sebuah organisasi/lembaga keuangan, agar dana yang disimpan dapat dikelola dengan baik dan benar.

### c. Bagi lembaga pendidikan

Hasil penelitian ini merupakan sumbangan atau tambahan kepustakaan serta referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut mengenai kinerja LPD.